

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminta oleh anggota masyarakat sebagaimana mengingat peranan penting dari jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan. Perkembangan jasa konstruksi yang pesat membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan atau dengan kata lain, peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi menjadikan perusahaan jasa konstruksi untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan kepada konsumen. Sebagai perusahaan konstruksi, kualitas tersebut bergantung pada sumber daya manusia terutama para pekerja lapangan yang dimiliki sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menjadikan pekerja lapangan sebagai aset penting perusahaan sehingga untuk mempertahankan kinerja atas pekerja lapangan tersebut, perusahaan memberikan penghargaan/imbalance dalam bentuk upah.

Pengupahan menjadi sangat penting karena biaya upah yang tidak tepat akan mempengaruhi perhitungan laba bersih suatu perusahaan. Kesalahan perhitungan upah menjadikan informasi pengupahan tidak akurat. Perhitungan upah pekerja lapangan yang tidak akurat dapat menyebabkan pengolahan data terhambat dikarenakan harus melakukan perhitungan ulang sehingga terjadi

keterlambatan pembayaran upah. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan pada pekerja lapangan yang akhirnya mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Maka dari itu, suatu perusahaan disarankan memiliki sebuah sistem pengupahan yang baik demi menunjang perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

PT Prima Karya Kontrindo (PKK) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. PKK berdiri pada tahun 1990 yang bertempat di kota Surabaya. Hingga saat ini PKK mempunyai berbagai proyek konstruksi baik yang berlokasi di dalam maupun di luar kota Surabaya. PKK memiliki banyak sumber daya manusia terutama pekerja lapangan yang berjumlah 150 orang sehingga sistem pengupahan yang memadai mampu mempertahankan kelangsungan kerja para pekerja lapangannya. Dalam sistem pengupahan, PKK menggunakan Lembar Harian Pekerja dan Hasil Opname Untuk Pekerjaan sebagai dasar untuk menghitung upah pekerja lapangan. Proses perhitungan sampai dengan pembayaran dilakukan oleh 5 karyawan yaitu administrasi, pelaksana, kepala administrasi dan keuangan (kepala admin), bendahara dan mandor proyek. Pembayaran upah pekerja lapangan dilakukan setiap seminggu sekali, perhitungan upah dilakukan sehari sebelum dilakukan pembayaran atau nyatanya perhitungan dilakukan hari Jumat kemudian Sabtu dibagikan upah kepada para pekerja lapangan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dasar perhitungan upah PKK ialah Lembar Harian Pekerja serta Hasil Opname Untuk Pekerjaan. Lembar Harian Pekerja berisikan riwayat kehadiran dibarengi dengan jam lembur para pekerja lapangan dalam periode seminggu. Lembar Harian Pekerja tersebut juga dilengkapi tarif upah masing-masing pekerja lapangan. Tarif upah ditentukan berdasarkan bobot dari proyek yang dibangun. Dasar yang kedua berupa Hasil Opname Untuk Pekerjaan. Hasil Opname Untuk Pekerjaan ini layaknya laporan pengembangan proyek secara fisik yang menjelaskan sejauh mana pekerja lapangan tersebut bekerja selama seminggu. Hasil Opname Untuk Pekerjaan berisikan uraian pekerjaan yang diselesaikan oleh para pekerja lapangan kemudian volume penyelesaian serta tarif dari pekerjaan yang diselesaikan (tarif opname). Besarnya tarif opname telah ditentukan oleh PKK. Total kalkulasipadaLembar Harian Pekerja serta total kalkulasi Hasil Opname Untuk Pekerjaan nantinya akan dibandingkan untuk menentukan upah dari pekerja lapangan tersebut. Dasar ini semua dikerjakan oleh pelaksana masing-masing proyek.

Prosedur pengupahan pada PKK diawali oleh pelaksana dan diakhiri oleh bagian bendahara. Pelaksana melakukan absensi terhadap para pekerja lapangan yang hadir di lokasi proyek dan menuliskannya pada Lembar Harian Pekerja. Perlakuan yang sama pada hasil opname, pelaksana mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan pekerja lapangan dan menuliskannya pada Hasil Opname Untuk Pekerjaan. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan

maka pelaksana wajib melakukan kalkulasi dengan tarif upah dan tarif opname. Kalkulasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu kalkulator. Setiap minggunya (hari Jumat), pelaksana akan menunjukkan hasil kalkulasi data tersebut kepada kepala admin. Kepala admin memverifikasi Lembar Harian Pekerja dan Hasil Opname Untuk Pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan kalkulasi ataupun salah pemberian tarif. Kepala admin membuat keputusan mengenai upah yang dibayarkan kemudian oleh bendahara dibuat rekap upah yang dibagikan keesokan harinya.

Namun dalam sistem pengupahan PKK terdapat beberapa kendala diantaranya, pelaksana kadang melakukan kesalahan dalam mencantumkan tarif upah dan tarif opname pekerja lapangan. Kesalahan pencatuman tarif tersebut disebabkan karena pelaksana salah dalam mengingat tarif yang seharusnya dicantumkan. Hal ini akan mempengaruhi total akhir pada Lembar Harian Pekerja dan Hasil Opname Untuk Pekerjaan sehingga menyebabkan kepala admin mengambil keputusan yang salah mengenai upah pekerja lapangan yang dibayarkan. Selain salah mencantumkan tarif, pelaksana juga sering melakukan kesalahan kalkulasi pada Lembar Harian Pekerja maupun Hasil Opname Untuk Pekerjaan. Kesalahan kalkulasi ini nantinya juga akan berpengaruh pada jumlah upah yang dibagikan. Dikarenakan kesalahan yang sering dibuat oleh pelaksana tersebut maka kepala admin melakukan verifikasi terhadap tarif yang dicantumkan dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil

kalkulasi pada Lembar Harian Pekerja serta Hasil Opname Untuk Pekerjaan. Pengecekan ulang menyebabkan informasi yang dihasilkan pada Lembar Harian Pekerja dan Hasil Opname Untuk Pekerjaan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan namun hal tersebut membuat tidak efisien dalam waktu sehingga proses perhitungan upah terkadang melebihi jam kerja PKK.

Dalam melakukan verifikasi tarif opname terkadang kepala admin mengandalkan ingatannya tanpa membuka daftar tarif opname sehingga ketika lupa akan tarif opname, kepala admin akan bertanya pada pelaksana. Kejadian ini memungkinkan pelaksana akan melakukan kecurangan disengaja mengenai tarif opname yang menyebabkan data menjadi kurang terjamin. Pada saat pembagian upah, bendahara kadang melakukan kesalahan yaitu tidak diberikan upah sesuai dengan keputusan kepala admin. Hal ini disebabkan karena banyaknya upah yang harus dibagikan dengan waktu yang relatif singkat serta jumlah pekerja lapangan yang cukup banyak memungkinkan bendahara hilangnya konsentrasi saat membagikan upah tersebut. Berkaitan dengan masalah ini bendahara harus mengecek kembali satu per satu upah dari para pekerja lapangan yang menyebabkan keterlambatan dalam pembagian upah.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada PKK, maka diperlukan sebuah sistem yang mampu melakukan kalkulasi serta menyajikan tarif secara otomatis dimana hal tersebut dapat dilakukan apabila sistem pengupahan PKK terkomputerisasi sehingga pemangag tertarik untuk membuat sebuah kajian mengenai sistem

pengupahan terkomputerisasi dengan judul “Analisis Dan Perancangan Sistem Pengupahan Pekerja Lapangan Dalam Rangka Meningkatkan Keakuratan Perhitungan Upah (Studi Praktik Kerja Pada Perusahaan Konstruksi). Dengan sistem pengupahan terkomputerisasi diharapkan mampu mengurangi kegiatan pengecekan ulang yang dilakukan dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pihak-pihak yang membutuhkan pada PKK dikarenakan perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Sistem pengupahan terkomputerisasi juga memenuhi harapan PKK yang ingin menjadikan sistem PKK terkomputerisasi pada tahun 2015.

1.2 Ruang lingkup

Dalam melakukan penyusunan laporan ini, pemegang membahas mengenai sistem pengupahan pekerja lapangan PKK terkomputerisasi yang dimulai dari proses perhitungan upah hingga pembuatan laporan terkait pengupahan pekerja lapangan PKK.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari laporan magang ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Laporan magang ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi, literatur, dan bahan kajian bagi pengguna laporan ini tentang masalah yang berkaitan dengan sistem pengupahan pekerja lapangan.

b. Manfaat Praktik

Hasil laporan magang ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk memenuhi harapan PKK dalam menjadikan sistemnya terkomputerisasi terutama dalam hal sistem pengupahan mengenai keakuratan perhitungan upah pekerja lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah gambaran inti mengenai sistematika penulisan tugas akhir skripsi (studi praktik kerja), terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN

Prolog untuk bab-bab berikutnya dan menguraikan latar belakang masalah yang meliputi gambaran umum mengenai perusahaan jasa konstruksi, pentingnya sistem pengupahan, serta terkait sistem pengupahan PKK secara singkat, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi (studi praktik kerja).

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung proses analisis dan perancangan sistem pengupahan pekerja lapangan serta sebuah rerangka berpikir mengenai permasalahan yang ada.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, alasan pemilihan tempat magang (praktik kerja) serta prosedur analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan berisikan profil perusahaan, deskripsi data yang digunakan, analisis data, dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan sistem dan saran yang diberikan kepada PKK atas pengembangan sistem pengupahan PKK.